



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN  
2017-2020

Disusun oleh:

**Ginetta Titania**

**1804431035**

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2022



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN  
2017-2020

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan  
Akuntansi

Disusun oleh:  
**Ginetta Titania**  
1804431035

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2022



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Ginetta Titania

NIM : 1804431035

Tanda tangan :



Tanggal : 03 Agustus 2022

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Ginetta Titania

NIM : 1804431035

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2017-2020

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Utami Puji Lestari, S.E., Ak., M.Ak., Ph.D., CA.

Anggota Penguji : Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak, M.M., M.Ak., CA, CPIA.

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

Ditetapkan di: Depok

Tanggal: 24 Agustus 2022

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP. 196404151990032002



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ginetta Titania  
Nomor Induk Mahasiswa : 1804431035  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota  
Depok Tahun 2017-2020

Disetujui oleh:

Pembimbing

Dr. Titi Suhartati, S.E., Ak, M.M., M.Ak.

NIP.196901111998022001

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

Ketua Program Studi

Yusep Friya P S, S.E., M.Ak.

NIP.196302031990032001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2017-2020**” dengan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan menyelesaikan perkuliahan pada Program D-IV Akuntansi Keuangan di Politeknik Negeri Jakarta.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr.sc. H., Zainal Nur Arifin Dipl-Ing. HTL.,M.T selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dr. Sabar Warsini, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Yusep Friya P S, S.E., M.Ak., CTA, CPIA. selaku Ketua Program Studi Politeknik Negeri Jakarta.
4. Dr. Titi Suhartati, S.E.,Ak.,M.M.,M.Ak., CA, CPIA. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmunya selama di perkuliahan.
6. Orang tua, adik, dan nenek yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
7. Kakak sepupu dan adik sepupu yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
8. Jhoni selaku teman dekat yang selalu memberi dukungan dan motivasi selama penyusunan skripsi.
9. Teman-teman kelas AKT 8A, 8B dan 8C yang telah berjuang bersama selama empat tahun di perkuliahan.
10. Semua pihak yang turut membantu dan tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Depok, 03 Agustus 2022

Ginetta Titania  
1804431035





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ginetta Titania  
NIM : 1804431035  
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2017-2020”** Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022

Yang menyatakan

Ginetta Titania



# Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2017-2020

Oleh:

Ginetta Titania

Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan Pemda Kota Depok tahun 2017-2020. Kinerja keuangan diukur menggunakan analisis pertumbuhan belanja, analisis varians belanja serta rasio efektivitas, derajat desentralisasi, efisiensi, dan ketergantungan daerah serta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Kota Depok tahun 2017-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemda Kota Depok jika diukur menggunakan pertumbuhan belanja menunjukkan pertumbuhan positif dan negatif. Lalu, perhitungan varians belanja menunjukkan penyerapan belanja telah mencapai 83,38%, angka tersebut menunjukkan selisih baik yang artinya belanja daerah tidak melebihi target anggaran. Perhitungan rasio menunjukkan bahwa rasio efektivitas sudah sangat efektif dengan persentase 109,55%. Rasio derajat desentralisasi Pemda Kota Depok dinilai sedang atau menuju daerah yang mandiri dengan persentase 39,56%. Namun, efisiensi Pemda Kota Depok masih kurang efisien dengan persentase 98,07%. Selain itu, ketergantungan kepada pusat sangat tinggi dengan persentase 56,21%. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pertumbuhan, Pendapatan Asli Daerah

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Analysis of Regional Financial Performance Depok City Government Period  
2017-2020*

By:  
Ginetta Titania

*Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program*

**ABSTRACT**

*This study aims to measure and analyze the financial performance of the Depok City Government in 2017-2020. Financial performance is measured using expenditure growth analysis, expenditure variance analysis and effectiveness ratio, degree of decentralization, efficiency, and regional dependence as well. This study uses a descriptive quantitative approach using the case study method. The data used is secondary data in the form of the Depok City Budget Realization Report for 2017-2020. The results showed that the performance of the local government of Depok City when measured using spending growth showed positive and negative growth. Then, the calculation of the expenditure variance shows that expenditure absorption has reached 83.38%, this figure shows a good difference which means that regional spending does not exceed the budget target. The ratio calculation shows that the effectiveness ratio is very effective with a percentage of 109.55%. The decentralization ratio of the Depok City Government is considered moderate or towards an independent area with a percentage of 39.56%. However, the efficiency of the Depok City Government is still less efficient with a percentage of 98.07%. In addition, dependence on the center is very high with a percentage of 56.21%. This is due to the fact that most of the regional revenue comes from transfers from the central government.*

*Keywords: Regional Financial Performance, Local government budget, Growth, Original Local Government Revenue*



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Akuntansi sektor publik.....	7
2.2 Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD).....	7
2.3 Kinerja keuangan daerah.....	8
2.5 Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	9
2.5.1 Analisis rasio keuangan.....	9
2.5.1 Analisis Pertumbuhan Belanja .....	11
2.5.2 Analisis Varians Belanja .....	12
2.6 Penelitian terdahulu .....	12
2.7 Kerangka Pemikiran.....	16
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
3.1 Jenis penelitian.....	17





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.2	Objek Penelitian.....	17
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	17
3.4	Metode pengumpulan data.....	18
3.5	Metode Analisis Data.....	18
<b>BAB 4</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	19
4.1.1	Profil Kota Depok.....	19
4.1.2	Visi dan Misi Kota Depok.....	20
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	20
4.2.1	Analisis Rasio Keuangan.....	20
4.2.2	Analisis Pertumbuhan Belanja.....	26
4.2.2	Analisis Varians Belanja.....	27
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>30</b>
5.1	Kesimpulan.....	30
5.2	Saran.....	31
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>32</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>34</b>

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020 ..	2
Tabel 1. 2 Anggaran dan Realisasi PAD Kota Depok Tahun 2017-2020.....	3
Tabel 2. 1 Kriteria Pengukuran Efektivitas.....	10
Tabel 2. 2 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi .....	10
Tabel 2. 3 Kriteria Pengukuran Efisiensi .....	11
Tabel 2. 4 Kategori Pengukuran Ketergantungan Daerah .....	11
Tabel 4. 1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Kota Depok Tahun 2017-2020.....	20
Tabel 4. 2 Perhitungan Rasio Efektivitas Pemda Kota Depok Tahun 2017-2020	21
Tabel 4. 3 Perhitungan Derajat Desentralisasi Pemda Kota Depok Tahun 2017-2020	23
.....	23
Tabel 4. 4 Perhitungan Rasio Efisiensi Pemda Kota Depok Tahun 2017-2020 ...	24
Tabel 4. 5 Perhitungan Rasio Ketergantungan Pemda Kota Depok Tahun 2017-2020.....	25
Tabel 4. 6 Perhitungan Pertumbuhan Belanja Pemda Kota Depok Tahun 2017-2020	27
.....	27
Tabel 4. 7 Perhitungan Varians Belanja Pemda Kota Depok Tahun 2017-2020..	28

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran..... 16







Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Laporan Realisasi Anggaran Kota Depok Tahun 2017 .....	34
Lampiran 2: Laporan Realisasi Anggaran Kota Depok Tahun 2018 .....	35
Lampiran 3: Laporan Realisasi Anggaran Kota Depok Tahun 2019 .....	37
Lampiran 4: Laporan Realisasi Anggaran Kota Depok Tahun 2020 .....	38





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, yang mana dalam pelaksanaannya mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Wardani & Saleh, 2020). Adanya otonomi daerah diharapkan agar pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada daerahnya masing-masing. Selain itu, otonomi daerah juga meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan bantuan kepada pemerintah pusat. Wujud kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, PAD harus dapat dioptimalkan guna keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang berhasil akan memberikan kemajuan pada daerah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Faridatussalam (2021) Agar dapat menilai suatu daerah, diperlukan standar atau acuan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan memiliki tujuan untuk menilai akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana yang terkait kegiatan pelayanan publik dan pembangunan daerah, serta menjadi tolak ukur dalam membuat kebijakan pada periode berikutnya (Susanto, 2019). Penilaian kinerja dapat dilihat dari segi keuangan. Hal tersebut dikarenakan untuk dapat terlaksananya berbagai kegiatan diperlukan kesediaan dana. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wujud akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. LKPD perlu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapat opini guna menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Terdapat 4 jenis opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat (Maysaroh, 2021).

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, namun, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dan Belanja Daerah (APBD). APBD dapat digunakan sebagai dokumen untuk pengukuran kinerja keuangan, karena untuk pengukuran kinerja keuangan diperlukan analisis terhadap APBD (Ani & Dwirandra, 2014). Standar atau acuan untuk pengukuran kinerja keuangan dapat diukur menggunakan analisis varians, pertumbuhan, dan rasio. Rasio yang digunakan yaitu rasio kemandirian, efektivitas, desentralisasi, ketergantungan, dan efisiensi.

Kota Depok merupakan daerah yang strategis karena berbatasan langsung dengan ibukota. Letaknya yang strategis membuat Kota Depok menjadi pilihan untuk menetap. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan Kota Depok termasuk yang paling tinggi di Provinsi Jawa Barat. Berikut data laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2020

**Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020**

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			
	2017	2018	2019	2020
Bekasi	3,81	3,74	3,66	3,59
Kota Depok	3,43	3,36	3,28	3,21
Kota Bekasi	2,60	2,53	2,46	2,39
Bogor	2,28	2,20	2,13	2,06
Bandung	1,70	1,63	1,56	1,49

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Perkembangan Kota Depok yang sangat pesat juga dapat terlihat dari banyaknya pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat hiburan. Hal tersebut berdampak pada realisasi PAD Kota Depok. Berikut data PAD Kota Depok tahun 2017-2020.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**Tabel 1. 2 Anggaran dan Realisasi PAD Kota Depok Tahun 2017-2020**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase
	Anggaran	Realisasi	
2017	1.078.263.821.180,92	1.210.748.605.561,14	112,29 %
2018	1.007.434.833.378,00	1.059.700.280.693,72	105,19 %
2019	1.138.499.654.711,00	1.293.003.769.037,00	113,57 %
2020	1.140.891.422.838,80	1.214.939.201.530,00	106,49 %

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Depok Tahun 2017-2020 (data diolah)

Berdasarkan data diatas, PAD Kota Depok sudah melebihi target yang dianggarkan. Pada tahun 2017 PAD terealisasi sebesar 112,29%. Tahun 2018 PAD terealisasi sebesar 105,19%, persentase realisasi PAD mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, persentase PAD mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 113,57%. Pada Tahun 2020 realisasi PAD mengalami penurunan kembali dengan persentase realisasi sebesar 106,49%. Walaupun setiap tahunnya PAD yang diterima Pemda Kota Depok melebihi target anggaran, namun pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat lebih besar dari penerimaan PAD. oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pemda Kota Depok masih bergantung kepada pemerintah pusat.. Namun, realisasi PAD yang melebihi target anggaran setiap tahunnya dapat digunakan Pemerintah Kota Depok untuk pembiayaan program pemerintah serta dapat digunakan untuk membangun wilayahnya. Pendapatan daerah harus dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Besarnya PAD yang diterima Kota Depok berbanding lurus dengan besarnya pendapatan daerah. Namun, besarnya pendapatan tidak diikuti dengan pemaksimalan belanja daerah. Selama tahun 2017-2020 realisasi belanja Kota Depok belum mencapai target anggaran. Rata-rata realisasi belanja kota Depok selama empat tahun sebesar 83%. Hal ini dapat dikatakan bahwa masih banyak dana belanja daerah yang belum terserap. Pemerintah belum dapat merealisasikan belanja daerah dengan maksimal. Serapan pendapatan yang masih rendah berdampak pada kinerja dan program pemerintah daerah, salah satunya pemerataan pembangunan (Andri, 2019). Selain dari PAD, pemerintah daerah juga memperoleh



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pendapatan transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Seharusnya pemerintah daerah menggunakan dana tersebut untuk menjalankan program-program yang belum terealisasi.

Sejak tahun 2010 hingga 2021 Pemerintah Kota Depok mendapatkan opini WTP 11 kali berturut-turut, walaupun ketergantungan Kota Depok masih sangat tinggi. Padahal menurut Ratmono (2017) ketergantungan pemerintah daerah berbanding negatif terhadap opini BPK. Ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi menyebabkan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat yang besar terkait penggunaan dana yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Sehingga kemungkinan untuk mendapatkan opini WTP akan semakin kecil.

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan, salah satunya oleh Rondonowu (2015) yang menyatakan bahwa PAD sudah terealisasi dengan sangat baik, sehingga secara keseluruhan rasio efektivitas Kabupaten Minahasa sudah sangat efektif. Namun, rasio efisiensi Kabupaten Minahasa dinyatakan kurang efisien. Hal ini disebabkan karena pengeluaran daerah lebih besar dibandingkan pendapatan daerah.

Menurut Ruhmaini (2018) peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah sangat penting. Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah (Khikmah, 2014). Maka, perlu adanya pengukuran kinerja sebagai evaluasi kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan digunakan untuk pembuatan keputusan dan evaluasi kinerja keuangan (Tanan & Duri, 2018).

## 1.2 Rumusan Masalah

Kota Depok berhasil mencapai target penerimaan PAD setiap tahunnya, Sehingga PAD yang terealisasi melebihi yang sudah dianggarkan. Namun, pendapatan yang berasal dari transfer pusat dan provinsi lebih besar dari penerimaan PAD yang artinya Kota Depok masih bergantung kepada pemerintah pusat. Padahal laporan keuangan Kota Depok memperoleh opini WTP dari BPK. Selain itu, pendapatan Kota Depok belum dapat direalisasikan secara penuh pada belanja daerah. Sehingga realisasi belanja daerah belum mencapai target anggaran. Hal tersebut berdampak pada kinerja Kota Depok, Sehingga, masih banyak





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

program pemerintah yang belum terealisasi. Pemerataan pembangunan merupakan salah satu program yang belum dapat terealisasi sepenuhnya. Padahal pemerintah daerah mendapatkan bantuan dana yang berasal dari pusat, yang seharusnya bisa untuk membiayai program-program yang belum terealisasi.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kajian latar belakang diatas, masalah yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Kota Depok selama periode 2017-2020 jika diukur dari ketergantungan kepada pusat, derajat desentralisasi, efisiensi dan efektivitas ?
2. Bagaimana kinerja Pemerintah Kota Depok selama periode 2017-2020 jika diukur dari pertumbuhan ?
3. Bagaimana penyerapan anggaran belanja selama periode 2017-2020 pada Kota Depok ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengukur kinerja keuangan daerah Kota Depok jika diukur dari ketergantungan kepada pusat, derajat desentralisasi, efisiensi dan efektivitas.
2. Untuk mengukur kinerja keuangan daerah Kota Depok jika diukur dari pertumbuhan.
3. Untuk menganalisis penyerapan realisasi belanja selama empat tahun terakhir.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis  
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pada bidang akuntansi sektor publik terutama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, serta menjadi bahan referensi untuk penelitian di bidang yang sama.
2. Manfaat praktis



Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan evaluasi bagi pemerintah Kota Depok, serta dapat dijadikan tolak ukur dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di periode selanjutnya.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I Pendahuluan

Pada BAB ini berisi tentang latar belakang yang menjelaskan alasan penelitian dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II Tinjauan Pustaka

Pada BAB ini dibahas teori yang menjadi landasan penelitian dalam menilai kinerja keuangan daerah Kota Depok.

### BAB III Metode Penelitian

Pada BAB ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, metode penentuan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan, dan metode analisis data.

### BAB IV Pembahasan

Pada BAB ini membahas tentang gambaran umum Pemda Kota Depok, hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja keuangan Pemda Kota Depok tahun 2017-2020

### BAB V Penutup

Pada BAB ini berisi mengenai kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang sudah diuraikan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis efektivitas yang telah dilakukan kepada Pemda Kota Depok tahun 2017-2020 menunjukkan kriteria sangat efektif. Pemda Kota Depok telah berhasil mencapai target anggaran PAD. walaupun PAD mengalami fluktuasi setiap tahunnya, namun realisasinya masih diatas 100%. Rata-rata realisasi selama empat tahun sebesar 109,55%, artinya Pemda Kota Depok sudah sangat baik kinerjanya dalam upaya mencapai target PAD setiap tahunnya. Selain itu, Pemda Kota Depok telah berhasil memaksimalkan potensi yang ada pada daerahnya. analisis selanjutnya yaitu analisis derajat desentralisasi Pemda Kota Depok Tahun 2017 dan 2020 menunjukkan hasil yang baik di tahun 2017 karena berada diantara 40%-50% dan termasuk kategori daerah yang mandiri. Untuk tahun 2018-2019 menunjukkan hasil sedang karena berada diantara 30%-40% dan termasuk kategori daerah menuju mandiri. kemudian analisis efisiensi pada Pemda Kota Depok tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa setiap tahun efisiensi terus mengalami penurunan. Akibat penurunan tersebut kinerja Pemda Kota Depok yang mulanya kurang efisien menjadi tidak efisien. Besarnya pengeluaran belanja setiap tahunnya berasal dari belanja operasi yang diperuntukan untuk gaji dan tunjangan pegawai. Analisis ketergantungan Pemda Kota Depok tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa ketergantungan Pemda Kota Depok sangat tinggi. Selama empat tahun rasio ketergantungan berada di atas 50% yang artinya lebih dari setengah pendapatan yang diterima Kota Depok berasal dari transfer pemerintah pusat.
2. Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja Kota Depok tahun 2017-2020 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan positif dan negatif. Tahun 2018-2019 pertumbuhan belanja mengalami kenaikan atau pertumbuhan positif, tetapi pada tahun 2017 dan 2020 pertumbuhan belanja mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif.





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Berdasarkan analisis varians belanja dapat dikatakan bahwa selisih antara realisasi dengan anggaran tidak terlalu besar. Realisasi anggaran tidak melebihi target anggaran atau menunjukkan selisih menguntungkan (*favorable*). Sehingga kinerja belanja dapat dikatakan baik walaupun realisasinya belum dapat menyerap semua target anggaran.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemda Kota Depok

Efektivitas PAD harus dipertahankan karena kinerja Pemda Kota Depok dalam merealisasikan PAD selama tahun 2017-2020 sudah sangat efektif dengan capaian realisasi di atas 100%. Pemda Kota Depok juga diharapkan bisa terus menggali potensi PAD yang ada pada daerahnya guna mengurangi ketergantungan kepada pusat. Untuk anggaran belanja daerah diharapkan kedepannya dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi yang ada agar anggaran dapat direalisasikan dengan baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama agar dapat mengembangkan penelitian dengan menambah metode wawancara kepada pengelola keuangan daerah agar mendapatkan informasi lebih banyak, jelas, dan aktual.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Metode penelitian kuantitatif*. Aswaja pressindo.
- Albasiah, O. A. (2012). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1*(2).
- Andri, A., Harun, A., & Dompok, T. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012. *Dialektika Publik: Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam, 3*(2), 17–25.
- Bahrullah Akbar, Siti Nurbaya. (2000). Akuntabilitas Daerah: Tinjauan Pemikiran Pelaksanaannya Dalam Rangka Otonomi Daerah, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Pemerintahan, Vol 01, No. 01*.
- CALK.2017. Catatan Atas Laporan Keuangan. Kalimantan Barat: Pemerintah Pemerintah Kota Depok.
- CALK.2018. Catatan Atas Laporan Keuangan. Kalimantan Barat: Pemerintah Pemerintah Kota Depok.
- CALK.2019. Catatan Atas Laporan Keuangan. Kalimantan Barat: Pemerintah Pemerintah Kota Depok.
- CALK.2020. Catatan Atas Laporan Keuangan. Kalimantan Barat: Pemerintah Pemerintah Kota Depok.
- Deddi, Nordiawan, Ayuningtyas, Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Faridatussalam, S. R. (2021). Analisis Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018. *Jurnal Manajemen Dayasaing, 22*(2), 71–76.
- Halim, A.2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Khikmah, A. (2014). Pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten lamongan berdasarkan konsep value for money. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 3*(1).
- Kusumawati, D. K., & Ratmono, D. (2017). Determinan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting, 6*(1), 177–191.
- LKIP. 2018. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 Badan Keuangan Daerah. Badan Keuangan Daerah.
- Ruhmaini, R., Abdullah, S., & Darwanis, D. (2018). Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 4*(1), 31–43.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Hal. 99.
- Maysaroh, S. (2021). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Di Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2015-2019). UPN Veteran Jatim.
- Ruhmaini, R., Abdullah, S., & Darwanis, D. (2018). Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 31–43.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147–153.
- Sutama. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Surakarta: Fairuz Media.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Tanan, C. I., & Duri, J. A. (2018). Analisis Rasio Untuk Pengukuran Kinerja Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Kota Jayapura). *Future: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 91–101.
- Wardani, S., & Saleh, M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015-2018. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 407–420.





# Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Laporan Realisasi Anggaran Kota Depok Tahun 2017

A.2.191 LKPD Kota Depok 2017.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

13 / 347 75%

Tools Fill & Sign Comment

**KOTA DEPOK**  
PEMERINTAH KOTA DEPOK  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
Urutur Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016  
*(dalam rupiah)*

Uraian	Ref	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
<b>PENDAPATAN</b>	<b>G.5.1.1</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>G.5.1.1.1</b>	734.944.351.531,87	841.743.994.100,00	114,55	683.925.218.835,00
Pendapatan Pajak Daerah	G.5.1.1.1.2	55.851.810.482,00	63.594.629.890,00	113,08	65.300.504.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lainnya (PAD) yang Sah	G.5.1.1.1.3	13.088.942.000,00	7.972.782.165,00	61,01	7.500.000.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	G.5.1.1.1.4	279.300.017.167,00	207.437.188.544,14	74,30	166.416.810.655,15
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>G.5.1.1.2</b>	1.079.263.821.186,92	1.210.748.685.581,14	112,29	922.297.784.280,15
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>G.5.1.1.2.1</b>				
<b>DANA PERMBAHANGIAN</b>	<b>G.5.1.1.2.1.1</b>	67.095.523.000,00	76.949.586.694,00	88,23	83.847.982.502,00
Dana Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.1.2	17.938.828.000,00	26.593.543.094,00	148,24	22.024.549.634,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	G.5.1.1.2.1.3	850.208.068.762,00	850.870.212.000,00	100,04	858.886.056.000,00
Dana Alokasi Umum	G.5.1.1.2.1.4	241.858.175.160,00	238.582.783.121,00	98,66	148.528.457.500,00
Dana Alokasi Khusus	G.5.1.1.2.1.5	1.196.985.822.348,00	1.190.882.388.898,00	99,57	1.118.681.855.838,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Pembiayaan	G.5.1.1.2.2	7.000.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	<b>G.5.1.1.2.2.1</b>	7.000.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
Dana Penyesuaian	G.5.1.1.2.3	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	G.5.1.1.2.3.1	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>G.5.1.1.2.3.2</b>				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.3.3	388.498.137.816,00	450.383.833.743,00	116,03	433.858.878.685,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	G.5.1.1.2.3.4	388.498.137.816,00	450.383.833.743,00	116,03	433.858.878.685,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan yang Sah	G.5.1.1.3	1.592.961.768.364,00	1.618.376.523.642,00	101,61	1.557.540.324.321,00
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>G.5.1.1.3.1</b>	19.229.708.000,00	18.078.004.000,00	92,57	6.631.819.700,00
Pendapatan Lainnya	G.5.1.1.3.2	19.229.708.000,00	18.078.004.000,00	92,57	6.631.819.700,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	G.5.1.1.3.3	19.229.708.000,00	18.078.004.000,00	92,57	6.631.819.700,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>G.5.1.1.4</b>	2.690.775.289.743,92	2.847.887.923.203,14	105,82	2.246.276.138.361,15

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2017 Halaman 1 dari 153

A.2.191 LKPD Kota Depok 2017.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

14 / 347 75%

Tools Fill & Sign Comment

Uraian	Ref	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
<b>BELANJA</b>	<b>G.5.1.2</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>G.5.1.2.1</b>	1.365.509.162.221,00	1.120.117.826.994,00	82,04	1.051.054.473.700,00
Belanja Pegawai	G.5.1.2.1.1	690.594.878.387,60	688.493.693.421,00	99,84	590.021.484.907,37
Belanja Barang dan Jasa	G.5.1.2.1.2	80.704.127.250,00	88.887.327.834,00	107,58	86.043.788.400,00
Hibah	G.5.1.2.1.3	28.234.883.200,00	20.402.401.888,00	72,26	48.946.117.427,00
Bantuan Sosial	G.5.1.2.1.4	870.818.804,00	870.814.041,00	100,00	907.683.366,00
Jumlah Belanja Operasi	G.5.1.2.1.5	2.165.683.847.862,90	1.814.456.239.148,00	83,79	1.732.973.547.568,37
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>G.5.1.2.2</b>	156.751.859.894,00	148.832.394.800,00	95,04	53.259.179.400,00
Belanja Tanah	G.5.1.2.2.1	128.371.713.700,00	117.880.064.400,00	91,94	201.828.020.872,00
Belanja Peralatan dan Mesin	G.5.1.2.2.2	235.987.145.512,00	218.215.504.120,00	92,03	301.616.418.465,00
Belanja Gedung dan Bangunan	G.5.1.2.2.3	372.382.795.355,00	321.622.487.430,52	86,37	378.478.805.963,00
Belanja Jalan, Inggas dan Jembatan	G.5.1.2.2.4	78.865.941.927,00	62.872.948.951,00	80,24	23.471.315.937,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	G.5.1.2.2.5	849.439.315.882,00	857.242.348.380,52	88,43	1.018.555.640.157,90
Jumlah Belanja Modal	G.5.1.2.3	101.165.681.886,48	265.457.271,00	0,26	2.827.615.840,00
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>G.5.1.2.3.1</b>	101.165.681.886,48	265.457.271,00	0,26	2.827.615.840,00
Belanja Tak Terduga	G.5.1.2.3.2	101.165.681.886,48	265.457.271,00	0,26	2.827.615.840,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	G.5.1.3	279.298.845.611,28	2.674.444.462.791,52	95,75	2.759.256.883.566,97
<b>JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>G.5.1.4</b>	(543.513.555.868,36)	(175.239.880.465,82)	(32,12)	(248.784.865.285,12)
<b>PEMBAYARAN</b>	<b>G.5.1.4.1</b>				
<b>PEMERINTAH PEMBIAYAAN</b>	<b>G.5.1.4.1.1</b>	845.513.555.868,36	843.859.880.115,36	99,74	1.051.340.033.219,48
Penggunaan SIPA	G.5.1.4.1.2	845.513.555.868,36	843.859.880.115,36	99,74	1.051.340.033.219,48
Jumlah Pembiayaan	G.5.1.4.2	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	130.700.000.000,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>G.5.1.4.2.1</b>	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	130.700.000.000,00
Penggunaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.1.4.3	542.513.555.868,36	543.859.880.115,36	99,70	912.428.033.219,48
Jumlah Pengeluaran	G.5.1.5	0,00	719.695.558.528,36	0,00	843.862.387.854,36
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>G.5.1.5</b>	0,00	719.695.558.528,36	0,00	843.862.387.854,36

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

WALIKOTA DEPOK  
KH. DR. MOHAMMAD IDRIS, MA.

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Lampiran 2: Laporan Realisasi Anggaran Kota Depok Tahun 2018

A2\_191\_LKPD\_Kota\_Depok\_2018.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

8 / 367 100%

Tools Fill & Sign Comment

**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (AUDITED)**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan 2017

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
1	PENDAPATAN	G.5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	G.5.1.1.1	708.022.038.200,00	830.491.826.276,00	106,00	841.743.904.180,00
4	Hasil Pajak Daerah	G.5.1.1.1.1	35.240.527.820,00	36.386.197.240,00	103,00	63.094.626.096,00
5	Hasil Retribusi Daerah	G.5.1.1.1.2	12.708.164.320,00	12.681.414.188,00	99,81	7.872.785.182,00
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	G.5.1.1.1.3	131.495.226.520,00	171.138.824.679,00	129,00	207.437.188.544,00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	G.5.1.1.1.4	1.007.438.433.379,00	1.059.706.289.819,00	105,19	1.240.746.605.914,00
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah					
10	PENDAPATAN TRANSFER	G.5.1.1.2				
11	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	G.5.1.1.2.1	106.426.617.115,00	78.454.570.284,00	73,76	78.646.586.684,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.1.1	28.098.192.889,00	23.999.469.588,00	85,40	26.593.543.004,00
13	Pendapatan Dana Alokasi Umum	G.5.1.1.2.1.2	800.318.095.000,00	850.076.591.600,00	106,00	850.076.591.000,00
14	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	G.5.1.1.2.1.4	191.458.061.776,00	156.516.463.727,00	81,72	226.552.546.121,00
15	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.186.624.862.572,00	1.159.698.983.997,00	97,64	1.169.892.889.889,00
16	Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya	G.5.1.1.2.2	78.250.000.000,00	78.250.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
17	Dana Perimbangan	G.5.1.1.2.2.1	78.250.000.000,00	78.250.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
18	Jumlah Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya		78.250.000.000,00	78.250.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
19	Transfer Pemerintah Provinsi	G.5.1.1.2.3	486.158.658.487,00	478.522.261.400,00	98,00	450.393.633.743,00
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.3.1	486.158.658.487,00	478.522.261.400,00	98,00	450.393.633.743,00
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		1.733.044.761.699,00	1.716.411.835.005,00	97,89	1.678.576.923.842,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer		1.733.044.761.699,00	1.716.411.835.005,00	97,89	1.678.576.923.842,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	G.5.1.1.3	124.891.000.000,00	123.280.664.379,00	98,83	18.078.804.000,00
24	Pendapatan Hibah	G.5.1.1.3.1	47.822.774.900,00	41.873.707.000,00	87,56	18.078.804.000,00
25	Pendapatan Lainnya	G.5.1.1.3.2	172.813.774.900,00	165.154.371.379,00	95,57	18.078.804.000,00
26	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		2.933.283.368.827,00	2.940.266.487.879,72	100,24	2.847.403.733.263,14
27	Jumlah Pendapatan		2.933.283.368.827,00	2.940.266.487.879,72	100,24	2.847.403.733.263,14

A2\_191\_LKPD\_Kota\_Depok\_2018.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

8 / 367 100%

Tools Fill & Sign Comment

23	Jumlah Pendapatan Transfer	G.5.1.1.3	1.733.044.761.699,00	1.716.411.835.005,00	97,89	1.678.576.923.842,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	G.5.1.1.3.1	124.891.000.000,00	123.280.664.379,00	98,83	18.078.804.000,00
25	Pendapatan Hibah	G.5.1.1.3.2	47.822.774.900,00	41.873.707.000,00	87,56	18.078.804.000,00
26	Pendapatan Lainnya	G.5.1.1.3.2	172.813.774.900,00	165.154.371.379,00	95,57	18.078.804.000,00
27	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		2.933.283.368.827,00	2.940.266.487.879,72	100,24	2.847.403.733.263,14
28	Jumlah Pendapatan		2.933.283.368.827,00	2.940.266.487.879,72	100,24	2.847.403.733.263,14
30	BELANJA	G.5.1.2				
31	BELANJA OPERASI	G.5.1.2.1	1.355.856.911.247,00	1.268.917.104.690,00	93,00	1.181.119.826.054,00
34	Belanja Pegawai	G.5.1.2.1.1	773.306.367.300,00	667.414.873.943,00	86,30	586.457.869.421,00
35	Belanja Barang dan Jasa	G.5.1.2.1.2	582.549.543.947,00	601.492.230.747,00	103,00	694.660.196.633,00
36	Belanja Bunga	G.5.1.2.1.3	95.944.010.100,00	70.046.004.600,00	73,00	86.807.327.834,00
37	Belanja Subsidi	G.5.1.2.1.4	62.186.081.028,00	41.311.378.800,00	66,43	20.402.401.688,00
38	Belanja Hibah	G.5.1.2.1.5	1.164.310.853,00	1.171.491.260,00	100,59	870.814.041,00
39	Belanja Bantuan Keuangan	G.5.1.2.1.6	2.288.426.283.720,00	1.904.869.842.789,00	83,17	1.814.696.229.146,00
40	Jumlah Belanja Operasi		2.288.426.283.720,00	1.904.869.842.789,00	83,17	1.814.696.229.146,00
42	BELANJA MODAL	G.5.1.2.2	47.476.116.000,00	42.784.742.200,00	90,20	148.832.364.600,00
44	Tanah	G.5.1.2.2.1	188.423.493.100,00	142.371.867.419,00	75,56	117.860.166.400,00
45	Peralatan dan mesin	G.5.1.2.2.2	212.000.886.772,00	197.988.592.581,00	93,47	218.216.504.120,00
46	Gedung dan bangunan	G.5.1.2.2.3	438.001.584.692,00	362.898.471.490,00	82,87	371.622.487.439,00
47	Jalan, jembatan dan jembatan	G.5.1.2.2.4	14.226.703.640,00	14.226.181.148,00	99,99	23.822.343.691,00
48	Aset Tetap lainnya	G.5.1.2.2.5	300.788.836.616,00	276.053.793.189,15	91,83	657.242.346.389,00
49	Jumlah Belanja Modal		300.788.836.616,00	276.053.793.189,15	91,83	657.242.346.389,00
50	BELANJA TIDAK TERUSUKA	G.5.1.2.3	314.527.936.083,88	169.171.891,00	0,05	285.467.271,00
51	Belanja Tidak Terusuka	G.5.1.2.3.1	314.527.936.083,88	169.171.891,00	0,05	285.467.271,00
52	Jumlah Belanja Tidak Terusuka		314.527.936.083,88	169.171.891,00	0,05	285.467.271,00
53	Jumlah Belanja		3.523.749.275.618,88	2.766.083.937.819,15	78,47	2.847.164.042.797,50
54	SURPLUS/DEFISIT (G.5.1.3)		(590.465.906.791,88)	(179.182.879.235,97)	(29,47)	(175.239.699.495,00)

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2018

1

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)

A2\_191\_LKPD\_Kota\_Depok\_2018.pdf - Adobe Reader

NO.	URAIAN	REF.	(dalam rupiah)			
			ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	%	REALISASI 2017
57	PEMBAYARAN	G.5.1.4				
58	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	G.5.1.4.1				
59	Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	G.5.1.4.1.1	719.099.599.520,98	719.099.599.520,98	100,00	643.859.899.115,39
60	Pencadangan Dana Cadangan					
61	Isuasi Perjudian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
62	Penerimaan Pijman Daerah					
63	Penerimaan Kembali Pembiayaan Pijman Daerah					
64	Penerimaan piutang daerah					
65	Jumlah Penerimaan		719.099.599.520,98	719.099.599.520,98	100,00	643.859.899.115,39
66	PEMBAYARAN PEMBIAYAAN	G.5.1.4.2				
67	Pembentukan Dana Cadangan					
68	Pembiayaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	G.5.1.4.2.1	128.636.852.529,10	128.636.852.529,00	100,00	100.000.000.000,00
69	Pembayaran Pinjam Utang					
70	Pembayaran Pinjaman Daerah					
71	Jumlah Pengeluaran		128.636.852.529,10	128.636.852.529,00	100,00	100.000.000.000,00
72	PEMBAYARAN NETO	G.5.1.4.3	590.462.746.991,88	590.462.746.991,88	100,00	543.859.899.115,39
73	Jumlah Utang Pembiayaan Anggaran (KUPA)	G.5.1.5		785.845.488.721,55		719.099.599.520,98

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

### Lampiran 3: Laporan Realisasi Anggaran Kota Depok Tahun 2019

A.2\_26\_LK\_Kota Depok\_Tahun 2019.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open [Icons] 7 / 314 100% Tools Fill & Sign Comment

**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (Audited)**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	<b>PENDAPATAN</b>	G.5.1.1				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	G.5.1.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah	G.5.1.1.1.1	911.161.768.399,00	1.018.129.612.075,00	111,74	839.491.835.275,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	G.5.1.1.1.2	41.304.430.901,00	40.835.247.582,00	96,86	36.388.197.243,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	G.5.1.1.1.3	13.453.860.609,00	21.701.132.428,00	161,30	12.681.414.156,00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	G.5.1.1.1.4	172.579.774.802,00	212.337.776.952,00	123,04	171.138.834.019,72
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		<b>1.128.499.634.711,00</b>	<b>1.253.063.769.037,00</b>	<b>113,57</b>	<b>1.059.706.289.693,72</b>
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	G.5.1.1.2				
11	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	G.5.1.1.2.1				
12	Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.1.1	88.028.088.000,00	59.334.129.615,00	67,40	78.494.670.284,00
13	Bagi Sumber Daya Alam	G.5.1.1.2.1.2	27.816.418.000,00	24.158.177.895,00	86,85	23.969.468.586,00
14	Dana Alokasi Umum	G.5.1.1.2.1.3	850.369.136.000,00	850.369.136.000,00	100,00	860.675.991.000,00
15	Dana Alokasi Khusus	G.5.1.1.2.1.4	199.275.842.447,00	193.686.735.455,00	97,20	195.518.453.727,00
16	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		<b>1.265.489.284.447,00</b>	<b>1.227.548.178.965,00</b>	<b>97,00</b>	<b>1.156.639.583.597,00</b>
17	Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya	G.5.1.1.2.2				
18	Dana Penyesuaian	G.5.1.1.2.2.1	20.465.336.000,00	10.232.668.000,00	50,00	79.250.000.000,00
19	Jumlah Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya		<b>20.465.336.000,00</b>	<b>10.232.668.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>79.250.000.000,00</b>
20	Transfer Pemerintah Provinsi	G.5.1.1.2.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.3.1	513.042.158.088,00	521.083.965.142,00	101,57	478.502.251.409,00
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		<b>513.042.158.088,00</b>	<b>521.083.965.142,00</b>	<b>101,57</b>	<b>478.502.251.409,00</b>
23	Jumlah Pendapatan Transfer		<b>1.798.996.778.545,00</b>	<b>1.758.865.812.187,00</b>	<b>97,77</b>	<b>1.715.411.835.096,00</b>
24	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	G.5.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah	G.5.1.1.3.1	124.080.200.000,00	125.715.328.821,00	101,32	123.280.664.379,00
26	Pendapatan Lainnya	G.5.1.1.3.2	58.518.616.800,00	58.692.896.427,00	86,61	41.873.707.000,00
29	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.121.895.238.856,00</b>	<b>3.236.277.986.392,00</b>	<b>103,69</b>	<b>2.940.266.487.872,72</b>
31	<b>BELANJA</b>	G.5.1.2				
32	<b>BELANJA OPERASI</b>	G.5.1.2.1				
34	Belanja Pegawai	G.5.1.2.1.1	1.500.171.864.900,00	1.340.183.748.820,00	89,34	1.208.917.104.586,00
35	Belanja Barang dan Jasa	G.5.1.2.1.2	933.459.189.272,00	808.848.131.967,00	86,65	667.414.873.943,00
36	Belanja Bunga		-	-	-	-
37	Belanja Subsidi		-	-	-	-
38	Belanja Hibah	G.5.1.2.1.3	134.034.962.800,00	110.751.723.850,00	82,65	76.046.094.500,00
39	Belanja Bantuan Sosial	G.5.1.2.1.4	59.241.454.500,00	43.818.988.700,00	73,94	41.311.378.500,00
40	Belanja Bantuan Keuangan	G.5.1.2.1.5	1.379.236.616,00	1.379.235.916,00	100,00	1.171.491.250,00
41	Jumlah Belanja Operasi		<b>2.628.366.708.138,00</b>	<b>2.305.069.839.253,00</b>	<b>87,70</b>	<b>1.934.668.942.789,00</b>
42	<b>BELANJA MODAL</b>	G.5.1.2.2				
44	Belanja Peralatan dan mesin	G.5.1.2.2.1	110.989.202.000,00	96.852.947.280,00	87,26	43.784.742.200,00
45	Belanja Peralatan dan mesin	G.5.1.2.2.2	142.482.387.424,00	133.260.162.515,00	93,52	142.371.807.419,60
46	Belanja Gedung dan Bangunan	G.5.1.2.2.3	383.680.156.375,00	323.537.239.086,00	84,32	187.898.590.951,55
47	Belanja Jalan, jembatan dan jembatan	G.5.1.2.2.4	380.564.990.177,00	336.932.318.556,00	88,53	352.608.471.490,00
48	Belanja Aspek Terpad lainnya	G.5.1.2.2.5	43.741.313.538,00	35.036.706.889,00	80,11	43.290.181.146,00
49	Jumlah Belanja Modal		<b>1.061.467.849.514,00</b>	<b>956.689.374.326,00</b>	<b>90,25</b>	<b>779.623.793.195,15</b>
50	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	G.5.1.2.3				
52	Belanja Tak Terduga	G.5.1.2.3.1	96.966.979.155,55	168.162.500,00	0,17	169.171.831,00
53	Jumlah Belanja Tak Terduga		<b>96.966.979.155,55</b>	<b>168.162.500,00</b>	<b>0,17</b>	<b>169.171.831,00</b>
54	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.786.740.738.887,55</b>	<b>3.231.267.376.679,00</b>	<b>85,33</b>	<b>2.765.063.987.815,15</b>
55	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	G.5.1.3	<b>(665.645.486.751,55)</b>	<b>5.018.438.313,00</b>	<b>(0,75)</b>	<b>175.182.579.299,57</b>

A.2\_26\_LK\_Kota Depok\_Tahun 2019.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

Open [Icons] 7 / 314 100% Tools Fill & Sign Comment

21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.3.1	513.042.158.088,00	521.083.965.142,00	101,57	478.502.251.409,00
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		<b>513.042.158.088,00</b>	<b>521.083.965.142,00</b>	<b>101,57</b>	<b>478.502.251.409,00</b>
23	Jumlah Pendapatan Transfer		<b>1.798.996.778.545,00</b>	<b>1.758.865.812.187,00</b>	<b>97,77</b>	<b>1.715.411.835.096,00</b>
24	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	G.5.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah	G.5.1.1.3.1	124.080.200.000,00	125.715.328.821,00	101,32	123.280.664.379,00
26	Pendapatan Lainnya	G.5.1.1.3.2	58.518.616.800,00	58.692.896.427,00	86,61	41.873.707.000,00
27	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		<b>183.598.816.800,00</b>	<b>184.408.225.248,00</b>	<b>100,44</b>	<b>165.154.371.379,00</b>
29	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.121.895.238.856,00</b>	<b>3.236.277.986.392,00</b>	<b>103,69</b>	<b>2.940.266.487.872,72</b>
31	<b>BELANJA</b>	G.5.1.2				
32	<b>BELANJA OPERASI</b>	G.5.1.2.1				
34	Belanja Pegawai	G.5.1.2.1.1	1.500.171.864.900,00	1.340.183.748.820,00	89,34	1.208.917.104.586,00
35	Belanja Barang dan Jasa	G.5.1.2.1.2	933.459.189.272,00	808.848.131.967,00	86,65	667.414.873.943,00
36	Belanja Bunga		-	-	-	-
37	Belanja Subsidi		-	-	-	-
38	Belanja Hibah	G.5.1.2.1.3	134.034.962.800,00	110.751.723.850,00	82,65	76.046.094.500,00
39	Belanja Bantuan Sosial	G.5.1.2.1.4	59.241.454.500,00	43.818.988.700,00	73,94	41.311.378.500,00
40	Belanja Bantuan Keuangan	G.5.1.2.1.5	1.379.236.616,00	1.379.235.916,00	100,00	1.171.491.250,00
41	Jumlah Belanja Operasi		<b>2.628.366.708.138,00</b>	<b>2.305.069.839.253,00</b>	<b>87,70</b>	<b>1.934.668.942.789,00</b>
42	<b>BELANJA MODAL</b>	G.5.1.2.2				
44	Belanja Peralatan dan mesin	G.5.1.2.2.1	110.989.202.000,00	96.852.947.280,00	87,26	43.784.742.200,00
45	Belanja Peralatan dan mesin	G.5.1.2.2.2	142.482.387.424,00	133.260.162.515,00	93,52	142.371.807.419,60
46	Belanja Gedung dan Bangunan	G.5.1.2.2.3	383.680.156.375,00	323.537.239.086,00	84,32	187.898.590.951,55
47	Belanja Jalan, jembatan dan jembatan	G.5.1.2.2.4	380.564.990.177,00	336.932.318.556,00	88,53	352.608.471.490,00
48	Belanja Aspek Terpad lainnya	G.5.1.2.2.5	43.741.313.538,00	35.036.706.889,00	80,11	43.290.181.146,00
49	Jumlah Belanja Modal		<b>1.061.467.849.514,00</b>	<b>956.689.374.326,00</b>	<b>90,25</b>	<b>779.623.793.195,15</b>
50	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	G.5.1.2.3				
52	Belanja Tak Terduga	G.5.1.2.3.1	96.966.979.155,55	168.162.500,00	0,17	169.171.831,00
53	Jumlah Belanja Tak Terduga		<b>96.966.979.155,55</b>	<b>168.162.500,00</b>	<b>0,17</b>	<b>169.171.831,00</b>
54	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.786.740.738.887,55</b>	<b>3.231.267.376.679,00</b>	<b>85,33</b>	<b>2.765.063.987.815,15</b>
55	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	G.5.1.3	<b>(665.645.486.751,55)</b>	<b>5.018.438.313,00</b>	<b>(0,75)</b>	<b>175.182.579.299,57</b>

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Lampiran 4: Laporan Realisasi Anggaran Kota Depok Tahun 2020

A.2.203\_LK\_Kota Depok\_TA 2020.pdf - Adobe Reader

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1	PENDAPATAN	05.11				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	05.11.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	05.11.1.1	896.112.226.167,00	946.575.772.110,00	105,61	1.018.129.812.875,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	05.11.1.2	34.873.738.686,00	38.183.011.839,00	109,49	40.835.247.542,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	05.11.1.3	24.263.795.171,00	8.816.976.722,00	36,31	21.701.132.428,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	05.11.1.4	142.631.755.814,60	218.301.039.720,00	153,05	233.337.776.842,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.146.881.422.838,60	1.214.039.201.530,00	106,48	1.263.967.769.837,00
8	PENDAPATAN TRANSFER	05.11.2				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	05.11.2.1				
10	Bag Hasil Pajak	05.11.2.1.1	96.433.528.538,00	86.946.795.468,00	90,14	59.334.129.815,00
11	Bag Sumbah Dana Lain	05.11.2.1.2	32.740.003.887,00	38.707.722.894,00	118,21	28.158.177.860,00
12	Dana Alokasi Umum	05.11.2.1.3	862.617.487.900,00	943.578.499,00	97,84	950.368.136.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	05.11.2.1.4	202.862.813.054,00	219.135.736.525,00	108,13	193.888.735.455,00
14	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.194.478.633.429,00	1.198.768.773.785,00	99,52	1.227.548.178.945,00
15	Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya	05.11.2.2				
16	Dana Perimbangan	05.11.2.2.1	63.978.963.688,00	63.984.803.000,00	100,01	10.232.668.000,00
17	Jumlah Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya		63.978.963.688,00	63.984.803.000,00	100,01	10.232.668.000,00
18	Transfer Pemerintah Provinsi	05.11.2.3				
19	Pengalangan Bag Hasil Pajak	05.11.2.3.1	520.412.566.660,00	439.281.807.747,00	84,41	521.083.965.142,00
20	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		520.412.566.660,00	439.281.807.747,00	84,41	521.083.965.142,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer		1.778.886.163.795,00	1.862.035.384.432,00	95,12	1.758.852.812.167,00
22	Jumlah Pendapatan		3.025.769.028.633,60	3.076.074.585.962,00	101,67	3.022.820.581.999,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	05.11.3				
24	Pendapatan Hibah	05.11.3.1	131.113.700.000,00	130.209.499.333,00	99,38	125.715.329.821,00
25	Pendapatan Lainnya	05.11.3.2	23.828.998.000,00	22.491.100.000,00	93,96	28.692.896.427,00
26	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		155.042.698.000,00	152.800.599.333,00	98,55	164.408.225.248,00
27	Jumlah Pendapatan		3.074.802.282.833,60	3.098.775.185.315,00	99,34	3.238.277.809.362,00
28	BELANJA	05.12				

A.2.203\_LK\_Kota Depok\_TA 2020.pdf - Adobe Reader

14	Dana Alokasi Khusus	05.11.2.1.3	862.917.487.900,00	943.978.499,00	97,84	950.368.136.000,00
15	Dana Alokasi Khusus	05.11.2.1.4	202.862.813.054,00	219.135.736.525,00	108,13	193.888.735.455,00
16	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.194.478.633.429,00	1.198.768.773.785,00	99,52	1.227.548.178.945,00
17	Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya	05.11.2.2				
18	Dana Perimbangan	05.11.2.2.1	63.978.963.688,00	63.984.803.000,00	100,01	10.232.668.000,00
19	Jumlah Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya		63.978.963.688,00	63.984.803.000,00	100,01	10.232.668.000,00
20	Transfer Pemerintah Provinsi	05.11.2.3				
21	Pengalangan Bag Hasil Pajak	05.11.2.3.1	520.412.566.660,00	439.281.807.747,00	84,41	521.083.965.142,00
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		520.412.566.660,00	439.281.807.747,00	84,41	521.083.965.142,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer		1.778.886.163.795,00	1.862.035.384.432,00	95,12	1.758.852.812.167,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	05.11.3				
25	Pendapatan Hibah	05.11.3.1	131.113.700.000,00	130.209.499.333,00	99,38	125.715.329.821,00
26	Pendapatan Lainnya	05.11.3.2	23.828.998.000,00	22.491.100.000,00	93,96	28.692.896.427,00
27	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		155.042.698.000,00	152.800.599.333,00	98,55	164.408.225.248,00
28	Jumlah Pendapatan		3.074.802.282.833,60	3.098.775.185.315,00	99,34	3.238.277.809.362,00
29	BELANJA	05.12				
30	BELANJA OPERASI	05.12.1				
31	Belanja Pegawai	05.12.1.1	1.502.432.118.754,00	1.345.661.702.319,00	89,54	1.340.183.748.820,00
32	Belanja Barang dan Jasa	05.12.1.2	861.629.270.229,00	761.026.671.814,00	88,32	808.848.131.947,00
33	Belanja Bangun					
34	Belanja Sektoral					
35	Belanja Hibah	05.12.1.3	206.842.851.600,00	196.964.296.600,00	95,32	110.718.723.850,00
36	Belanja Bantuan Sosial	05.12.1.4	26.839.000.000,00	18.263.165.000,00	69,02	43.814.998.700,00
37	Belanja Bantuan Keuangan	05.12.1.5				
38	Jumlah Belanja Operasi		2.398.343.240.583,00	2.222.845.635.733,00	89,37	2.305.008.830.253,00
39	BELANJA MODAL	05.12.2				
40	Belanja Tanah	05.12.2.1	120.124.420.000,00	106.782.821.955,00	88,88	96.852.947.280,00
41	Belanja Perawatan dan mesin	05.12.2.2	110.862.700.857,00	102.295.109.179,00	92,26	133.262.182.515,00
42	Belanja Oorng dan bangunan	05.12.2.3	250.896.533.838,45	243.450.816.862,00	97,14	323.537.238.080,00
43	Belanja Jasa, upah dan jasa	05.12.2.4	244.208.138.911,21	216.187.039.160,00	88,56	328.622.318.506,00
44	Belanja Asst Tetap lainnya	05.12.2.5	42.780.039.553,00	36.357.959.884,00	85,03	35.506.736.889,00
45	Jumlah Belanja Modal		768.491.833.451,66	705.054.247.842,00	91,75	828.689.374.326,00
46	BELANJA TAK TERDUGA	05.12.3				
47	Belanja Tak Terduga	05.12.3.1	304.610.828.835,21	172.102.804.328,55	56,53	168.182.500,00
48	Jumlah Belanja Tak Terduga		304.610.828.835,21	172.102.804.328,55	56,53	168.182.500,00
49	Jumlah Belanja		3.871.263.899.893,55	3.199.202.487.163,35	82,64	3.221.281.278.679,00
50	BURUP(LIB/DEFISIT)	05.13	(584.561.417.060,55)	(138.427.291.798,55)	23,51	(5.618.420.315,00)

### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta